

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di segala bidang telah membuka wawasan banyak pemimpin Pemerintah Propinsi atau warga dunia bisa untuk mengembangkan kerjasama internasional, ikut mendapat manfaat bagi kepentingan diri atau kepentingan masyarakatnya. Suatu peristiwa atau informasi lokal jika diinformasikan secara global akan segera mendapat perhatian masyarakat dunia. Jika informasi tersebut adalah informasi tentang potensi sumber daya alam untuk diolah, atau informasi peluang pengembangan pariwisata atau informasi peluang perdagangan suatu komoditi akan membuka peluang bagi pemilik informasi sumberdaya dalam negeri bertemu dengan pemilik modal atau pemilik teknologi dari luar negeri yang selanjutnya jika mereka bisa bertemu akan memungkinkan terjadinya suatu kerjasama internasional.

Pada masa ini, Indonesia sedang membangun kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Propinsi mengetahui potensi sumber daya alam, sumber daya komoditi export, sumber daya manusia diwilayahnya masing-masing yang telah diidentifikasi oleh Badan Perencanaan Daerah, atau Badan Penanaman Modal, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Industri. Potensi di daerah bidang pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, pendidikan, budaya, dan masih banyak lagi perlu dipromosikan atau diperkenalkan keluar negeri agar potensi tersebut menjadi berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat daerah.

Dilihat dari perkembangan teknologi saat ini, Pemerintah propinsi di Indonesia

umumnya sudah sangat dalam melaksanakan promosi potensi daerahnya untuk

dikerjakamakan dengan pihak terkait diluar negeri. Beberapa Pemerintah Propinsi ada yang secara terbatas telah menjalankan kerjasama luar negeri tersebut antara lain Pemerintah Propinsi D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Keterbatasan bekerjasama dengan luar negeri dapat disebabkan belum pahamiannya para Biokrat di Propinsi dan Kabupaten/ Kota dalam mekanisme kerjasama hubungan internasional; dapat juga disebabkan karena tidak mengetahui bidang apa saja atau kepada pihak yang mau kerjasama luar negeri dapat diharapkan terjalin.

Adapun hambatan-hambatan dari kerjasama luar negeri dalam bentuk *Sister Province*,¹ disebabkan antara lain :

- Pelembagaan Kerjasama Internasional belum mantap

Di Indonesia, hampir 70% kerjasama internasional berbentuk *sister province* dan *sister city* belum melembaga. Peranan elit nasional maupun elit daerah sangat kental, hal ini apabila elit nasional dan elit daerah tidak memegang jabatan tertentu didaerah ataupun nasional, maka kerjasama tersebut secara perlahan-lahan akan surut. Oleh karena itu, kerjasama internasional perlu dilembagakan sehingga jika ada pergantian pejabat dalam kerjasama tersebut akan tetap

- Kurang siap memahami peta potensi mitra kerjanya

Kurangnya pihak Indonesia memahami peta potensi baik berupa keadaan ekonomi sosial budaya, politik di mitra propinsinya. Hal ini banyak mengakibatkan program-program yang ditawarkan selalu tidak sesuai dengan fakta.

¹Makalah, Usmar Salam, *Dinamika Kerjasama Internasional Propinsi di Indonesia dengan Luar Negeri*, des 2004 halaman 3-5

lain. Demikian juga dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional No.24 tahun 2000³, yang mengatur tentang tata cara dalam membuat perjanjian kerjasama internasional. Disamping itu Undang-Undang Penanaman Modal Asing : yang semuanya untuk merespon dalam arti mengkoordinasikan dinamika kehendak Pemerintah Propinsi yang didasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah⁴ diperbolehkan untuk menggalang kerjasama luar negeri, agar kerjasama luar negeri dapat terwujud aman, lancar, dan tidak melanggar undang-undang yang ada.

Bertolak dari Undang-Undang yang mengatur dan memberikan kewenangan untuk kerjasama dengan negara lain tersebut, maka pemerintah RI memandang perlu untuk mengadakan kerjasama luar negeri dengan negara lain sesuai dengan tujuan negara.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- Bagaimana peranan Departemen Luar Negeri RI dalam proses mekanisme dan prosedur kerjasama internasional yang aman, legal, terlindungi jika prakarsa berasal dari luar negeri atau prakarsa berasal dari Pemerintah Propinsi khususnya D.I.Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermaksud pertama untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan menganalisa isi perundangan terkait kerjasama internasional, untuk kemudian menentukan secara normatif besaran bidang peluang kerjasama internasional yang

³ UU No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Propinsi untuk bekerjasama dengan pihak luar negeri. Termasuk bagaimana mekanisme yang telah ditetapkan tersebut menunjang atau justru menghalangi aspirasi daerah untuk mengadakan kerjasama dengan luar negeri. Jika Pemerintah Propinsi ada yang mampu bekerjasama pada lebih 5 bidang berarti peluang kerjasama luar negeri dapat disebut luas.

D. Kerangka Pemikiran Pendekatan Masalah

Mengenai kerjasama internasional ada beberapa argumen yang mendasari terjadinya kerjasama internasional⁵ tersebut, yaitu :

1. Ada dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan bersama
2. Ada ide yang sepaham atau sejalan
3. Ada tawar menawar antara lembaga aktor hubungan internasional
4. Ada rancangan rasional yang sengaja untuk kerjasama internasional.

Perspektif pertama, menjelaskan awalnya sesudah perang dunia yang dimenangkan Amerika Serikat dan Inggris, sistem politik dunia dikuasai atau di hegemoni oleh Amerika Serikat dan Inggris. Mereka menjadi penstabil utama (hegemon) sistem politik internasional. Dalam kondisi hegemonis tersebut, Amerika dan Inggris dapat memaksakan kehendak dan inisiatifnya dengan kekuatan militer.

Namun ketika Amerika Serikat perang dengan Vietnam tahun 1970 mengeluarkan banyak dana dolar, dan untuk itu Amerika telah mengeluarkan dana dolar yang melebihi kesanggupan jaminan emasnya untuk mencetak dolar, maka Amerika sejak tahun 1971 melepaskan kaitan antara emas yang dimiliki dengan dolar yang boleh dicetaknya.

Tahun 1975 Amerika kalah perang dengan Vietnam dan dari dua kejadian tersebut dianggap Amerika telah kehilangan hegemoninya.

Namun kenyataannya pada tahun-tahun tersebut ada kerjasama internasional dalam GAAT, IMF, dan Bank Dunia. Ini membuktikan negara-negara yang menjadi pendukung lembaga tersebut, sebagai unit analisa dapat menyesuaikan kepentingan nasionalnya sehingga tidak dalam kondisi konfliktual.

Menurut **Robert Kehone (1984)⁶** ada empat perspektif terjadinya kerjasama internasional. **Perspektif pertama**, Jika masing-masing kebijakan aktor politik internasional dianggap menghambat kepentingan aktor politik internasional lain, maka masing-masing aktor akan berusaha untuk membuat kondisi agar tidak menjadi konfliktual, dengan cara saling memfasilitasi menuju kerjasama internasional. Hal itu berbeda dengan kondisi harmoni yang tidak ada konfliktual karena sejak awal masing-masing sudah dianggap berkesesuaian dan saling memfasilitasi kepentingan aktor lain. Jadi jika kebijaksanaan luar negeri masing-masing aktor bisa berkesesuaian, maka potensi terjadinya kerjasama lebih besar dari pada potensi terjadinya konfliktual. **Perspektif kedua**, menyatakan bahwa kerjasama terjadi karena adanya sekelompok elit pemikir gagasan (think tank) yang idenya kurang lebih sama dan kemudian negara mengadopsi gagasan mereka serta memodifikasinya untuk dijadikan kebijaksanaan luar negeri dan dilaksanakan bersama. Dalam literatur kelompok pemikir tersebut pernah dikenal dengan julukan Mafia Berrkeley, Chicago Boy's. Sedang di Indonesia kelompok professional yang mempunyai kompetensi dan otoritas pemikiran pada disiplin tertentu seperti **Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Alumni Indonesia**, merupakan kelompok

Perspektif ketiga, neo-liberalisme berargumentasi bahwa kerjasama internasional terjadi karena ada tawar menawar kelembagaan. Dalam kondisi hegemonis, si Pemegang Hegemoni memaksakan kehendaknya untuk membentuk sesuatu rejim organisasi dan administrasi internasional untuk mengelola isu tertentu dengan menggunakan kekuasaannya seperti dalam NATO, WTO, dan PBB. Dalam pandangan neo-liberal, kerjasama internasional terjadi karena masing-masing aktor mengoptimalkan daya guna (utility) sumber daya yang dimiliki secara maksimal (rational utility maximalization). Karena lokasi negara menyebar dipermukaan bumi, maka distribusi kekuasaan negara juga menyebar. Hal itu memungkinkan tiap aktor negara mengadakan inisiatif kerjasama bilateral atau multilateral. Kerjasama bisa terjadi karena ada proses negosiasi atas isu tertentu. Jika kesepakatan-kesepakatan antar aktor dapat diwujudkan tertulis dalam perjanjian internasional, maka terjadilah kerjasama internasional.

Perspektif keempat, berargumentasi berdasarkan rational design. Argumentasinya bahwa kerjasama internasional bidang ekonomi terjadi karena para aktor mau bekerjasama setelah mengadakan kalkulasi laba rugi (cost-benefit ratio). WTO, APEC, Protokol Kyoto, G7 menggunakan perspektif tersebut. Keempat perspektif tentang terjadinya kerjasama internasional yang juga dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini kerjasama luar negeri antar Pemerintah Propinsi.

Dalam menganalisa masalah-masalah diatas, penulis menggunakan berbagai pendekatan, konsep yang sesuai dengan penelitian diatas untuk mempermudah penulis dalam mendeskripsikannya. Dalam hal ini penulis menggunakan :

Landasan Operasional Politik Luar Negeri RI

(Pendekatan GBHN dan Kepentingan Nasional)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Indonesia, bahwa Hubungan Luar Negeri Indonesia didasarkan pada azas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara, seperti yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan tujuan nasional, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi untuk melaksanakan tujuan tersebut, selama ini Indonesia telah melaksanakan tujuan tersebut, selama ini Indonesia telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan berbagai organisasi baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral maupun multilateral yang sepenuhnya diabdikan pada kepentingan nasional.

Sebelumnya, perlu adanya penjelasan mengenai Hubungan Luar Negeri, Politik Luar Negeri, serta Perjanjian Internasional. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah ditingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau warga negara Indonesia. Politik Luar Negeri Indonesia adalah kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Sedangkan Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh

dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri Indonesia didasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dan Politik Luar Negeri Indonesia berdasarkan prinsip bebas aktif yang dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, serta rasional dan luwes.⁸

Landasan Operasional PLNRI dengan GBHN dan Prioritas Pembangunan nasional

Menurut GBHN bahwa hubungan luar negeri merupakan kegiatan antar bangsa baik regional maupun global melalui berbagai forum bilateral maupun multilateral yang diabdikan melalui kepentingan nasional, dilandasi prinsip politik luar negeri bebas aktif dan diarahkan untuk terwujudnya tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru, termasuk tatacara ekonomi terus ditinbngkatkan melalui upaya kerjasama dengan negara lain.

Dalam GBHN ketetapan MPR No. IV/ MPR/ 1999 ditegaskan bahwa arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat, dan mencapai kepentingan nasional.⁹ Dijelaskan pula dalam melakukan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak harus

⁸ Djumadi M. Anwar, Diktat *Politik Luar Negeri RI*, Jur HI, FISIPOL, UMY, 1999, hal 15.

⁹ Djumadi M. Anwar op.cit.hal 44

dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat. Dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat maka kualitas diplomasi ditingkatkan melalui intensifikasi kerjasama regional dan internasional.

Dalam GBHN dijelaskan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Arah kebijakan dibidang ekonomi adalah “ Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan sumber daya alam yang ada terutama bagaimana cara mengolahnya agar dapat berayaguna dan berhasilguna.

Dari landasan ini maka kerjasama antara Indonesia dengan Jerman terjalin. Dalam GBHN telah diatur bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional maka hubungan dengan luar negeri adalah suatu keharusan. Hubungan antar negara diwujudkan dengan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara lain, dan salah satunya adalah kerjasama sister province/ propinsi kembar antara Pemerintah Indonesia secara umum, Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta secara khusus dengan bidang kerjasama pembanguna proyek pembangunan pembangkit listrik dalam upaya menunjang kesejahteraan masyarakat di Propinsi D.I.Yogyakarta, meningkatkan penguasaan serta pengembangan teknologi juga menjadi prioritas dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia. Sehingga bertolak dari GBHN ini terjalinlah kerjasama proyek pembangunan pembangkit listrik di bidang “

Konsep Kepentingan nasional

Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat sesuatu atau fenomena tertentu.¹⁰

Dari definisi diatas, maka untuk menjelaskan fenomena diatas, penulis mengajukan kerangka pemikiran sebagai acuan, kerangka pemikiran yang digunakan adalah konsep kepentingan nasional.

Kepentingan Nasional adalah hal penting yang diinginkan oleh suatu bangsa. Semua negara pada dasarnya mempunyai cita-cita nasional yang hendak dicapai dan ingin diperjuangkan. Di Indonesia, kepentingan nasional diwujudkan oleh kehendak anggota MPR yaitu tertuang dalam GBHN. Dalam GBHN telah ditegaskan bahwa arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.¹¹

Kepentingan Nasional di daerah dan program kabinet juga diupayakan pencapaiannya oleh Pemerintah Propinsi, antara lain kerjasama pembangunan antar propinsi dengan propinsi luar negeri. Untuk mencapai kepentingan nasional tersebut, maka hubungan dengan negara lain adalah suatu keharusan, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan luar negeri yang tepat.

Menurut *Jack C. Plano dan Roy Olton*, kebijaksanaan politik luar negeri dirumuskan sebagai berikut :

¹⁰ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta : LP3S, 1990), hal. 93-94

¹¹ *Ketetapan Ketetapan MPR 1999*, Sinar Grafika, Jakarta 1999, hal 77

*“Foreign Policy is strategy or planned course of action develop by the decision makers of a state vis avis other state or international entities aimed as achieving specific goals defined intern of national interest”.*¹²

Maksudnya adalah :

“Bahwa politik luar negeri suatu negara adalah strategi atau rangkaian tindakan yang terencana, yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan dari suatu negara terhadap negara lain atau terhadap entitas internasional, ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang terdefinisi intern bagi kepentingan nasional “.

Meskipun tujuan politik luar negeri suatu negara dengan negara lain berbeda, namun pada umumnya berkisar pada beberapa hal berikut : self preservation, security, national well-being, national prestige, protection and advancement of ideology, the pursuit of power.

Kepentingan nasional suatu negara dalam kurun waktu tertentu berbeda dengan kurun waktu lainnya, sehingga mengakibatkan keadaan politik internasional berubah-ubah. Akan tetapi bagaimanapun juga perubahan politik internasional, kebijakan luar negeri harus selalu mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Namun perumusan masalah kerjasama proyek pembangkit listrik antara Indonesia dengan Jerman, terdapat satu tujuan politik luar negeri yang paling dominan, yaitu : *national well-being*. Kerjasama Indonesia dengan Jerman lebih ditekankan pada masalah kerjasama sister province atau propinsi kembar antara Indonesia dengan pihak Jerman, dalam hal ini tujuan yang hendak dicapai adalah kesejahteraan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka kerjasama antara dua negara ini, maka pemerintah mengupayakan berbagai kebijakan politik luar negeri untuk mencapai tujuan. Seperti yang dijelaskan dalam GBHN bahwa arah kebijakan bidang ekonomi

¹² Jack Bland dan Barry Oltan, dikutip dari Dimyadi M. Anwar, op.cit. hal 57

memprioritaskan bidang kerjasama luar negeri. Sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal, merupakan strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang harus dicapai diluar batas wilayahnya dan itu diterapkan dalam sejumlah keputusan yang dibuat dalam kebijaksanaan politik luar negeri suatu bangsa.

Berkenaan dengan pengoptimalan pengembangan kerja yang ada dalam lembaga Biro Kerjasama di Pemerintah Propinsi D.I.Yogyakarta maka langkah yang dapat diambil adalah dengan memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan yang ada. Pengoptimalan kekuatan dalam suatu bentuk kerjasama luar negeri yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut harus diperbaiki melalui tolak ukur dengan membandingkan rencana kerja yang ada, dan kenyataan dari hasil kerjasama luar negeri tersebut.

Yang dibahas dalam laporan kerjasama tersebut adalah berapa banyak kerjasama yang dijalankan Pemerintah Propinsi D.I.Yogyakarta dengan pihak luar negeri, serta berapa bidang yang dikerjasamakan.

Optimal¹³ adalah suatu kondisi dimana suatu pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuan yang maksimal sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.

Dalam suatu kerjasama luar negeri, optimal itu terjadi jika *Cost* (dana) < *Benefit* (manfaat) sehingga manfaat lebih besar dari kelayakan anggaran yang dikeluarkan dan menghasilkan beberapa banyak kerjasama yang dijalankan. Tidak optimal terjadi sebaliknya yaitu anggaran yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang didapat. Manfaat atau keuntungan itu sendiri berupa sumber daya manusia, dana atau anggaran serta sarana prasarana.

¹³ *Konsep Dasar D. N. Mochar, Duta Sinar Harapan 2002 halaman 386*

E. Kerjasama Propinsi yang ada (Sister Province)

Di Indonesia, banyak propinsi/ kota ingin melakukan kerjasama dengan propinsi/ kota yang ada di luar negeri. Mereka menemukan mitranya, adapula yang sampai saat ini tidak menemukan mitranya. Berbeda dengan propinsi D.I.Yogyakarta yang tidak pernah mencari mitra kerja dengan propinsi di luar negeri namun tawaran untuk bekerjasama selalu muncul. Dari pengamatan yang telah dilakukan mulai tahun 1990-an¹⁴ munculnya ide kerjasama internasional beberapa propinsi/ kota di Indonesia dengan mitranya di luar negeri dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peranan Tokoh dan Elit Nasional

Para tokoh/ elit nasional sangat menentukan didalam munculnya ide kerjasama internasional dalam bentuk *sister province/ sister city*. Contohnya Jakarta.

2. Peranan Tokoh dan Elit Daerah

Peranan para elit daerah untuk merintis kerjasama internasional dalam bentuk *sister province/ sister city* juga banyak ditemukan. Misalnya munculnya propinsi DIY bekerjasama dengan beberapa propinsi di luar negeri seperti dengan Kyoto *Perfecture* (Jepang) dan Ismalia (Mesir) tidak lepas dari elit daerah yaitu Gubernur Propinsi D.I.Yogyakarta dengan Gubernur yang ada diluar negeri.

3. Peranan Kelompok Epistemik

Kelompok epistemik juga dapat merealisir kerjasama antar kota maupun antar propinsi. Sebagai contoh, DIY dengan Tyrol Austria.

4. Berawal dari Kegiatan Proyek

Munculnya kerjasama *Sister province* dan *sister city* juga merupakan perluasan dari kegiatan suatu proyek. Berkembang pesatnya kerjasama antara propinsi DIY dengan Tyrol merupakan perluasan proyek yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada dengan Universitas yang ada di Tyrol.

Departemen Luar Negeri Indonesia dalam menghadapi perubahan sistem hubungan internasional juga mengubah pola diplomasinya yang dulu hanya merespon issue internasional saja menjadi total diplomacy intermestik.¹⁵ Sekarang Departemen Luar Negeri Indonesia tidak hanya mempromosikan potensi daerah keluar negeri tetapi juga membawa informasi perkembangan internasional kepada Pemerintah Daerah secara aktif. Dengan pola diplomasi demikian diharapkan nantinya akan ada lebih banyak kerjasama antara pemerintah propinsi dengan pihak badan hukum diluar negeri yang dapat diwujudkan dengan tidak melanggar pagar perundangan hubungan luar negeri dan perjanjian internasional yang telah ditentukan Pemerintah Pusat Indonesia.

Pemerintah Propinsi di Indonesia (Yogyakarta, Jawa Timur) dalam rangka mencapai kepentingan nasional di daerah telah menggunakan berbagai pendekatan untuk menjalankan wewenang perundangan dalam kerjasama luar negeri, namun undang-undang hubungan luar negeri Indonesia, undang-undang pembuatan perjanjian internasional, undang-undang penanaman modal asing, undang-undang hak patent yang ada telah menjadi pagar panduan dalam bertindak mempromosikan kerjasama luar negeri oleh pemerintah propinsi.

Sebagai contoh, kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu :

- Propinsi Jawa Timur yaitu;

1. Osaka Jepang sejak tahun 1984 bidang kerjasama meliputi : Pertukaran kebudayaan, Ekonomi, Tehnik, Sumber Daya Manusia, Pertanian, Peternakan, Perdagangan, dan Lingkungan Hidup.
2. Saga Jepang sejak tahun 1998 memberikan pelatihan-pelatihan dengan Bea Siswa dari Pemerintah Jepang.
3. Australia Barat tahun 1990 meliputi bidang Ekonomi dan Perdagangan, Industri dan Pariwisata, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Administrasi, Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja, Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olah Raga, Perikanan, Pertambangan dan Energi.
4. Gyeongnam Korea Selatan tahun 1996 meliputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perdagangan, Investasi, Industri, Pendidikan, Pelatihan, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga.
5. Shandong Cina tahun 2001 meliputi bidang Perdagangan dan Bisnis, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata.
6. Shanghai China sejak tahun 1993 meliputi bidang Ekonomi, Perdagangan, Industri, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pertanian, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesenian, Pariwisata, Kesehatan, dan Pelabuhan.
7. Tianjin China meliputi bidang Pendidikan, Pertanian, Peternakan, dan Pengobatan

8. Tiajin China tahun 2003 meliputi bidang Ekonomi, Perdagangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Seni dan Budaya, Pendidikan, Olah Raga, Kesehatan, Transportasi, dan Pembangunan Perkotaan.¹⁶

- Propinsi D.I.Yogyakarta telah bekerjasama dengan berbagai pihak luar negeri sebagai berikut¹⁷:

No	BIDANG KERJASAMA	BENTUK HUKUM	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU	PIHAK-PIHAK
1	Bantuan teknis pengelola lingkungan Hidup	Perjanjian Kerjasama	WZ.445.08/13	23-02-01	12 tahun	Pemerintahan RI Pemerintahan Republik Jerman
2	Seni, Budaya, Iptek, Pariwisata, Industri dll	MOU	-	24-03-00	5 tahun	Pretuktur Kyoto, Jepang Pemerintah Propinsi D.I.Y Tyrol, Austria Pemerintahan Propinsi D.I.Y
3	Ekonomi, Perdagangan Industri, Pariwisata, Pertanian, Pendidikan, Kebudayaan, Lingkungan Hidup, dan Investasi	MOU	2905/MK/XII99/35	30-11-99	5 tahun	
4.	Perdagangan, Pariwisata, Teknologi, Industri, Pendidikan, dan	MOU	-	24-12-91	5 tahun	Propinsi Ismalia Republik Arab Mesir Pemerintahan Propinsi D.I.Y

¹⁶ Laporan Kerjasama Luar Negeri Propinsi Jawa Timur, 2004 Oleh Sekretariat Daerah, Biro Kerjasama

8. Tjpin China tahun 2003 meliputi bidang Ekonomi, Perdagangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Seni dan Budaya, Pendidikan, Olah Raga, Kesehatan, Transportasi, dan Penggunaan Perikanan.¹⁶

• Propinsi D.I.Yogyakarta telah bekerjasama dengan berbagai pihak luar negeri sebagai berikut¹⁷:

No	BIDANG KERJASAMA	BENTUK HUKUM	NOMOR	TANGGAL	JANGKA WAKTU	PIHAK-PIHAK
1	Bantuan teknis pengelolaan lingkungan Hidup	Perjanjian Kerjasama	WX.442.08/13	23-03-01	12 tahun	Pemerintahan RI Pemerintahan Republik Jerman
2	Seni, Budaya, Perik, Pariwisata, Industri dll	MOU	-	24-03-00	2 tahun	Pemerintah Kyoto Jepang Pemerintah Propinsi D.I.Y Pemerintahan Tyrol Austria Propinsi D.I.Y
3	Ekonomi, perindustrian, industri, pariwisata, Peranan, Pendidikan, Kebudayaan, Lingkungan Hidup dan investasi	MOU	302WIKXII1232	30-11-99	2 tahun	Propinsi D.I.Y
4	Perdagangan, Pariwisata, Teknologi, Industri, Pendidikan dan	MOU	-	24-12-91	2 tahun	Propinsi Jermania Republik Arab Mesir Pemerintahan Propinsi D.I.Y

¹⁶ Laporan Kerjasama Luar Negeri Propinsi Jawa Timur, 2004 Oleh Sekretariat Daerah, Biro Kerjasama
¹⁷ Laporan Kerjasama Luar Negeri Propinsi D.I.Yogyakarta Oleh Sekretariat Daerah, Biro Kerjasama

5.	Kebudayaan Ekonomi Perdagangan, Industri, Pariwisata, Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Lingkungan Hidup, Investasi	MOU	-	25-08-97	5 tahun	California USA Pemerintahan Propinsi D.I.Y
6.	Proyek Pembangkit Listrik		-	-		Jerman Pemerintahan Propinsi D.I.Y
7.	Kunjungan			Sedang terjadi		Korea Pemerintah Propinsi D.I.Y.

Kerjasama Luar Negeri yang terjadi di Jawa Tengah :¹⁸

- a. Queensland-Australia : Pertanian, Pembangunan Kota dan Desa, Transportasi dan Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Investasi, Pendidikan Ilmu Penegetahuan dan Teknologi.
- b. Propinsi Fujian-China : Perdagangan, Industri, Investasi, Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Sektor Swasta, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan dan Lingkungan.
- c. Chungcheongbukdo-Korea : Perdagangan, Industri, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Sektor Swasta, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan dan Lingkungan.

¹⁸ Kerjasama Luar Negeri yang terjadi di Jawa Tengah oleh Sekretariat Daerah, Bina Kerjasama

F. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditarik kesimpulan dengan sementara yaitu :

- Peranan Departemen Luar Negeri Indonesia dalam mekanisme kerjasama luar negeri di Pemerintah Propinsi D.I.Yogyakarta adalah sebagai koordinator, supervisor, fasilitator.

H. Metode Penelitian

Variabel dalam penelitian atau **unit analisa** dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Indonesia No.37 tahun 1999 kaitannya dengan peranan Departemen Luar Negeri Indonesia; Undang-Undang Perjanjian Internasional Indonesia No. 24 tahun 2000; Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 dan perubahannya.

Unit analisa lainnya adalah Pejabat-Pejabat di Biro Kerjasama Luar Negeri di Propinsi D.I.Yogyakarta dan jika mungkin Pejabat yang sama di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah.

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan **studi pustaka** mempelajari laporan kerjasama internasional yang telah dijalankan oleh Pemerintah Propinsi D.I.Yogyakarta,¹⁹ dan Jawa Timur²⁰. Teknik pengumpulan data dengan **wawancara langsung, atau via telepon, atau tertulis via facsimili**, akan dilakukan dengan Pejabat Biro Kerjasama Luar Negeri yang dapat dihubungi dengan mudah.

¹⁹ *Laporan Kerjasama Luar Negeri Propinsi D.I.Yogyakarta*, Oleh Biro Kerjasama Propinsi D.I.Yogyakarta, 2004

²⁰ *Laporan Kerjasama Luar Negeri Propinsi Jawa Timur*, Oleh Biro Kerjasama Propinsi Jawa Timur, 2004

Sumber informasi Potensi daerah akan dicari lewat situs internet,²¹ Pemerintah Propinsi atau melalui Humas Badan Koordinasi Penanaman Modal di Pusat atau masing-masing Propinsi. Sumber Teknologi dan Sumber Modal yang berasal dari luar negeri dan diasumsikan berasal dari *Multi National Corporation* (MNC), akan diakses dengan mencari *web site di internet*.

Cara penafsiran atau teknik penyimpulan menggunakan metode **deduksi** dan **induksi** bergantian terhadap hasil kumpulan data atau wawancara. Tentu nanti akan menghasilkan kesimpulan yang sifatnya; legalistis, ada yang normative, dan ada pula yang sifatnya temuan baru atau usulan peneliti bagi perkembangan kelembagaan atau pemecahan masalah pembangunan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah hasil karya tulis ini, maka perlu adanya penyusunan yang teratur dan sistematis. Oleh karena itu, karya tulis ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab :

Bab I. Pendahuluan

Akan berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran Pendekatan Masalah, Bentuk Kerjasama yang ada (Sister Province), Hipotesa, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. Akan membahas tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam Kerjasama Internasional, dan mencapai kepentingan nasional.²² Dibahas pula prinsip-

²¹ *www.kham.or.id*

prinsip untuk bisa kerjasama dengan luar negeri dan bidang apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan luar negeri.

Bab III. Akan membahas tentang strategi Departemen Luar Negeri Indonesia²³ dalam pelaksanaan hubungan kerjasama internasional; menurut Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Indonesia No. 37 tahun 1999²⁴ dan Undang-Undang Pembuatan Perjanjian Internasional No. 24 tahun 2000, serta pemanfaatan perjanjian internasional oleh Pemerintah Daerah. Dibahas juga tentang kepentingan nasional Indonesia terhadap Jerman

Bab IV. Akan membahas mekanisme pembuatan kerjasama luar negeri, jika kerjasama prakarsa berasal dari instansi dalam negeri atau Pemerintah Propinsi dan subjek hukum internasional.

Setelah membahas mekanisme tersebut akan dibahas pula kerjasama proyek daerah antara PemDa D.I.Yogyakarta serta dikaji fakta-fakta hasil kerjasama luar negeri yang telah dijalankan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Proyek Bribin. Dan mekanisme usulan proyek daerah, serta akan dibahas pula hambatan-hambatan kerjasama internasional.

Bab V. Akan berisi rangkuman kesimpulan dari bab I, II, III, IV, dan kemudian akan disimpulkan lagi untuk dicarikan kesimpulan pokoknya apakah tujuan penelitian ini

²³ *Diktat Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Djumadi Anwar. UMY, 2004

tercapai yaitu apakah skripsi ini menjawab rumusan masalah yang dipasang dan atau dapat memberikan wawasan/insight yang ada